

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**TAHUN
2022**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis 2021-2026.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kinerja.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2022 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Simpang Empat, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas


ASRI HAMDI ST
Pembina/IV.a
NIP. 19761123 200501 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase areal kawasan kumuh	3.68%	3.68%	100.00%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.04	90.04	100.00%
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	0	0.00%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59	0.59	100.00%
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100.00%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100.00%
2	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100.00%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100.00%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	9	9	100.00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100.00%
		Nilai SAKIP	A	CC	50.00%
		Level maturitas SPIP	3	3	100.00%
TOTAL					87,50%

Ketercapaian target kinerja Tahun 2022 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Tentu saja tingkat pencapaian kinerja yang baik ini akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang muncul akan dicarikan jalan keluarnya sebagai sebuah tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Pembentukan Instansi	3
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Tugas Pokok, Fungsi Instansi	5
1.5 Sumber Daya Manusia Instansi	6
1.6 Aspek Strategis Organisasi	7
1.7 Aspek Sarana dan Prasarana	8
1.8 Sistematika Penyajian.....	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.2 Perjanjian Kinerja	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Metodologi Pengukuran Kinerja	18
3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja	19
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja	20
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi yang Dilakukan	21
3.3 Realisasi Anggaran	29

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 1.2. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.3. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per – 31 Desember 2022	8
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel 2.3. Kebijakan dan Program	15
Tabel 2.4. Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022	16
Tabel 2.5. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022	17
Tabel 3.1. Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja	18
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022	20
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	5
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati Kabupaten Pasaman Barat, DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Barat terhadap penyelenggara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kabupaten Pasaman Barat maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
		Persentase areal kawasan kumuh
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni
		Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
		Persentase pengembang yang tersertifikas
2	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)
		Persentase Konflik Pertanahan Difasilitasi
		Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan Instansi

Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok

kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang perubahan petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Struktur Organisasi

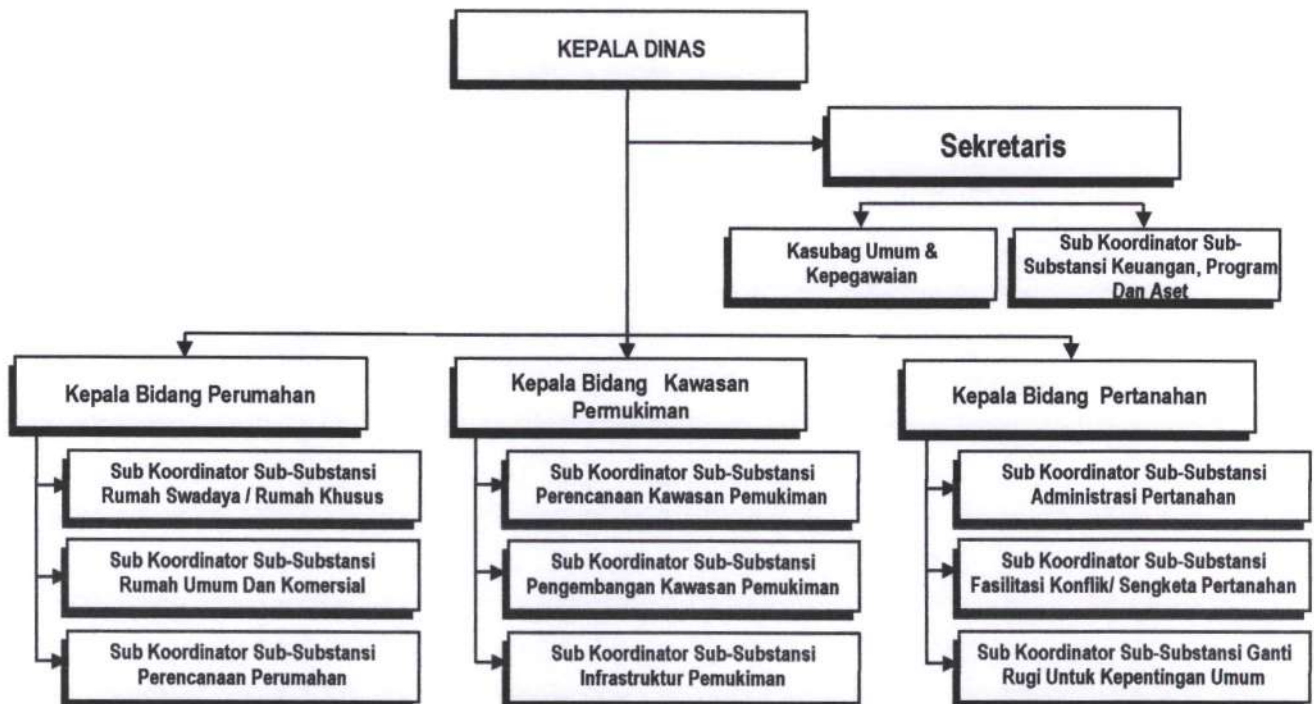
Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2022 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas	: Asri Hamdi, ST
Sekretaris	: Eli Martona, Si. Msi.
- Kasubag Umum & Kepegawaian	: Sahid, ST
- Sub Koordinator Sub-Substansi Keuangan, Program Dan Aset	: Mudirman, SE
Kepala Bidang Pertanahan	: Elifsan, SH.
- Sub Koordinator Sub-Substansi Administrasi Pertanahan	: Berhat Nanang K, ST
- Sub Koordinator Sub-Substansi Fasilitasi Konflik/ Sengketa Pertanahan	: -
- Sub Koordinator Sub-Substansi Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum	: Isramora
Kepala Bidang Kawasan Permukiman	: Asri Hamdi, ST
- Sub Koordinator Sub-Substansi Perencanaan Kawasan Permukiman	: -
- Sub Koordinator Sub-Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	: -
- Sub Koordinator Sub-Substansi Infrastruktur Permukiman	: Zakial Himmi, ST
Kepala Bidang Perumahan	: Wildan, SH. MM.
- Sub Koordinator Sub-Substansi Rumah Swadaya / Rumah Khusus	: -

- Sub Koordinator Sub-Substansi Rumah Umum Dan Komersial : **Popi Jasmiati, ST**
- Sub Koordinator Sub-Substansi Perencanaan Perumahan : -

Secara lengkap bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dapat terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Konkuren Wajib Pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten mempunyai fungsi adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan permukiman;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan tugas dibidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi urusan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Melaksanakan percepatan pembangunan Infrastruktur di Daerah tertinggal dan terisolir;
5. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas meliputi Umum dan Kepegawaian, Program, Aset dan Keuangan;

6. Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sumber Daya Manusia Instansi

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman keadaan pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebanyak 35 orang dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 59 orang dengan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
IV	6	6
III	8	14
II	2	6
I	-	-
PTT	4	4
Jumlah	28	30
THL	13	29
Jumlah	35	59

Tabel 1.2.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
S3	-	-
S2	2	3
S1	6	31
D III	2	8
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	23	19
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	35	59

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berupa urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan juga urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berupa urusan bidang pertanahan, serta menyelenggarakan enam fungsi utama, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, aset dan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data dan dokumen perencanaan sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Harga lahan di kawasan perkotaan tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
3. Perizinan pembangunana perumahan terkoordinir dengan baik
4. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dan infrastruktur
5. Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum adanya DED kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten (< 10 hektar)
7. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum).
8. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan .
9. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
10. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

1.7 Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- 2) Kenyamanan ruangan;
- 3) Fungsi Ruang;
- 4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per – 31 Desember 2022
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
1	02.02.03.04.002	Portable Generating Set	2018	15,000,000
2	02.03.01.01.004	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2009	229,900,000
3	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2011	182,175,000
4	02.03.01.03.002	Pick Up	2008	110,000,000
5	02.03.01.04.022	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	2008	336,000,000
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2005	12,500,000
7	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2005	8,500,000
8	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2006	12,500,000
9	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2006	13,500,000
10	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2007	18,920,000
11	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2013	24,250,000
12	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
13	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
14	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
15	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
16	02.03.01.05.002	Scooter	2017	18,325,775
17	02.03.01.05.002	Scooter	2017	18,325,775
18	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
19	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
20	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
21	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
22	02.03.02.01.002	Gerobak Dorong	2019	700,000
23	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000
24	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000
25	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
26	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000
27	02.05.02.01.007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2019	1,000,000
28	02.06.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2009	3,916,667
29	02.06.01.02.009	Mesin Absen (Time Recorder)	2017	4,500,000
30	02.06.01.02.009	Mesin Absen (Time Recorder)	2018	7,780,000
31	02.06.01.04.001	Lemari Besi	2019	15,000,000
32	02.06.01.05.007	Papan Pengumuman	2013	2,500,000
33	02.06.01.05.007	Papan Pengumuman	2013	2,500,000
34	02.06.01.05.007	Papan Pengumuman	2013	2,500,000
35	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	2017	12,000,000
36	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	2017	29,850,000
37	02.06.02.01.005	Kursi Besi/Metal	2017	5,000,000
38	02.06.02.04.001	Lemari Es	2019	4,950,000
39	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
40	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
41	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
42	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
43	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
44	02.06.02.04.003	AC Unit	2019	4,500,000
45	02.06.02.04.003	AC Unit	2019	4,500,000
46	02.06.02.04.003	AC Unit	2019	4,500,000
47	02.06.02.04.006	Kipas Angin	2017	1,500,000
48	02.06.02.04.006	Kipas Angin	2017	3,000,000
49	02.06.02.06.003	Televisi	2018	5,000,000
50	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	4,410,000
51	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	8,525,000
52	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	4,420,000
53	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	5,150,000
54	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	2,500,000
55	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	9,148,000
56	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	25,000,000
57	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	15,000,000
58	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2019	6,900,000
59	02.06.02.07.001	Alat Pemadam Portable	2017	2,000,000
60	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
61	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
62	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
63	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
64	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
65	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
66	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
67	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
68	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
69	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	6,750,000
70	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000
71	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
72	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000
73	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000
74	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
75	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
76	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
77	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
78	02.06.03.02.002	Lap Top	2014	8,000,000
79	02.06.03.02.002	Lap Top	2014	15,000,000
80	02.06.03.02.002	Lap Top	2015	13,000,000
81	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	6,550,000
82	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	6,550,000
83	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
84	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
85	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
86	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
87	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
88	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
89	02.06.03.02.002	Lap Top	2018	20,000,000
90	02.06.03.02.002	Lap Top	2018	20,000,000
91	02.06.03.02.002	Lap Top	2018	24,000,000
92	02.06.03.04.008	Printer	2017	2,200,000
93	02.06.03.04.008	Printer	2017	2,200,000
94	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
95	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
96	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
97	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
98	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
99	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
100	02.06.03.04.008	Printer	2018	3,500,000
101	02.06.03.04.008	Printer	2018	3,500,000
102	02.06.03.04.008	Printer	2018	6,000,000
103	02.06.03.04.008	Printer	2018	6,000,000
104	02.06.03.04.008	Printer	2018	6,000,000
105	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
106	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
107	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
108	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
109	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
110	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
111	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
112	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
113	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
114	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
115	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
116	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
117	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
118	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
119	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
120	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
121	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
122	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
123	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
124	02.06.03.06.004	Modem	2018	3,020,000
125	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	2018	15,000,000
126	02.07.02.06.002	Wireless Amplifier	2018	8,000,000
127	1.3.2.10.002.002.009	SCANNER	2022	15,640,000
128	1.3.2.10.002.002.009	SCANNER	2022	15,640,000

1.8 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat, latar belakang, maksud dan tujuan, serta gambaran, Aspek strategis Organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Kinerja dan juga Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud. Dan juga menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2022 dan langkah-langkah atau saran-saran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada pengeluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

” Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera ”

Misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah :

Misi Pertama : **Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing.**

Misi Kedua : **Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.**

Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang melaksanakan program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel di halaman berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	1.	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
2.	Pemenuhan penyelesaian konflik pertanahan	2.	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat serta RPJMD tahun 2021-2026 dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Sumber Data
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	(Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / Jumlah masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Sumber Data
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	(Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni/ Jumlah penduduk korban bencana) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase areal kawasan kumuh	(Luas Kawasan Kumuh / Luas Wilayah) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(Jumlah rumah layak huni / Jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah kabupaten) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	(Luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU / Total luasan pemukiman) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	(Jumlah Pengembang Yang Tersertifikas i/ Total jumlah pengembang) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)	(Jumlah Izin Lokasi / Permohonan Izin Lokasi) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	(Jumlah konflik pertanahan difasilitasi / Jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan) x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah fasilitas ganti rugi tanah	Angka Mutlak (Jumlah Fasilitas ganti rugi tanah dalam satu tahun anggaran)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kebijakan dan program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasaman Barat dijabarkan dalam tabel berikut :

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian

Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabuapten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Berikut adalah Kebijakan dan Program Kinerja (Tabel 2.3) untuk mendukung tercapainya sasaran beserta Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 (Tabel 2.4) :

Tabel 2.3.
Kebijakan dan Program

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting	1.	Program Pengembangan Perumahan
		2.	Program Kawasan Permukiman
		3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		5.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Menyediakan fasilitasi dan mediator untuk penyelesaian konflik pertanahan	6.	Program Pengelolaan Izin Lokasi
		7.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		8.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat telah disusun anggaran, sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Awal	Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.388.647.549	3.728.780.850	
2	Program Pengembangan Perumahan	500.000.000	26.955.015.400	
3	Program Kawasan Permukiman	7.731.618.549	8.079.071.549	
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.911.400.000	2.133.500.000	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.505.006.559	2.082.076.585	
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0	15.172.000	
7	Program Pengelolaan Izin Lokasi	0	25.386.000	
8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	77.030.000	104.368.800	
9	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	11.886.000	20.076.000	
10	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	37.630.000	0	
Total		15.163.218.657	43.143.447.184	

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, maka ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Pada tabel berikut akan disajikan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Tabel 2.5.
Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase areal kawasan kumuh	3.68%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.04
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
2	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	9
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai SAKIP	A
		Level maturitas SPIP	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan juga analisis akuntabilitas keuangan.

3.1.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah metode pengukuran sederhana yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran ditetapkan skala pengukuran dengan kategori sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.
Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan
1	91% - 100%	Sangat Baik
2	76% - 90%	Baik
3	66% - 75%	Cukup
4	51% - 65%	Kurang
5	< 50%	-

3.1.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian target 12 (Dua Belas) indikator kinerja utama 3 (Tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Kinerja Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase areal kawasan kumuh	3.68%	3.68%	100.00%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.04	90.04	100.00%
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	0	0.00%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59	0.59	100.00%
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100.00%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100.00%
2	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100.00%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100.00%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	9	9	100.00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100.00%
		Nilai SAKIP	A	CC	50.00%
		Level maturitas SPIP	3	3	100.00%
TOTAL					87,50%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2022 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang guna mengetahui perlu dilakukan analisis kecendrungan kinerja suatu instansi apakah meningkat atau menurun.

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase areal kawasan kumuh		4.24 %	3.68%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni		87.79	90.04
		Persentase pengembang yang tersertifikasi		50 %	0
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU		0.41	0.59
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	100
2	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi		100 %	100%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi		100 %	100%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah		7	9
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK atas laporan keuangan		WTP	WTP
		Nilai SAKIP		B	CC
		Level maturitas SPIP	2	2	3

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengalami penurunan kinerja pada indikator kinerja Nilai SAKIP dimana pada tahun 2021 mendapat nilai B sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan nilai menjadi CC, dan pada indikator kinerja Persentase pengembang yang tersertifikasi tidak ada

capaian dan tidak ada realisasi. Sedangkan pada indikator kinerja lainnya mengalami keberhasilan dalam pencapaian kinerja 100% untuk tahun 2022, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus terjadi peningkatan yang signifikan hal ini tentu berkat kerja keras sehingga dapat dicapai kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tersebut.

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta solusi yang dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan capaian kegiatan yang dilakukan untuk oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Persentase areal kawasan kumuh

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase areal kawasan kumuh ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase areal kawasan kumuh	3,68%	3,68%	100,00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Faktor Pendukung Capaian kinerja Persentase areal kawasan kumuh adalah dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan yang berada di dalam kawasan kumuh, diantaranya :

- Peningkatan Jalan Belakang SMA I Sungai Aur kecamatan Sungai Aur
- Peningkatan Jalan Block F RT 06 OPHIR Luhak Nan Duo
- Peningkatan Jalan Gang Talao Jorong Padang Tujuh Kecamatan Pasaman
- Peningkatan Jalan Harapan Ds Kampung Baru Jorong Tampus Kecamatan Lembah Melintang
- Peningkatan Jalan Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh
- Peningkatan Jalan Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aur
- Peningkatan Jalan Jorong Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur
- Peningkatan Jalan Kampung Alang Jorong Lembah Binuang Kecamatan Pasaman
- Peningkatan Jalan Kebun Lubuk Ijau Jorong Patomuan Kecamatan Talamau
- Peningkatan Jalan Khalifah Abdurrahman Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading
- Peningkatan Jalan Muara Simpang Jorong Koto Sawah Ujung Gading

- Peningkatan Jalan Mushalla Imam Kasiak Tinggi Jorong Pisang Hutan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
- Peningkatan Jalan Pasar 2 Suak Kecamatan Sungai Beremas
- Peningkatan Jalan Penghubung Kampung Empat - Kampung Lima
- Peningkatan Jalan Samping Musholla Nurul Saadah Dusun 3 Rimbo Binuang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman

Faktor Penghambat upaya pencapaian target kinerja Persentase areal kawasan kumuh yang telah ditetapkan, adalah :

- Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan RPJMD dan Resntra OPD, yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak bisa difokuskan untuk menuntaskan satu lokasi kawasan kumuh.
- Belum adanya dokumen DED untuk masing-masing Lokasi kawasan kumuh, sehingga sulit menentukan pekerjaan yang akan dilakukan pada lokasi kawasan kumuh.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Keberhasilan capaian sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.04	90.04	100.00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Faktor Pendukung Capaian kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah dengan adanya pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Batahan Kecamatan Ranah Batahan sebanyak 15 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan sebanyak 15 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Kajai Kecamatan Talamau sebanyak 15 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Kinali Kecamatan Kinali sebanyak 15 Unit Rumah.

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh sebanyak 15 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak 15 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah I sebanyak 45 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah II sebanyak 10 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah III sebanyak 18 Unit Rumah.
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah IV sebanyak 25 Unit Rumah.

Faktor Penghambat upaya pencapaian target kinerja Persentase areal kawasan kumuh yang telah ditetapkan, adalah :

- Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan RPJMD dan Resntra OPD, yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak bisa difokuskan untuk menuntaskan satu lokasi kawasan kumuh.

Persentase pengembang yang tersertifikasi

Keberhasilan capaian sasaran persentase pengembang yang tersertifikasi ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	0	0.00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut “ - ”. (Tidak ada nilai)

Faktor Pendukung adalah sudah tersedianya anggaran untuk registrasi pengembang ini pada Anggaran TA. 2022.

Faktor Penghambat adalah tidak jelasnya keterkaitan pengembang perumahan dengan DPKPP dan pengembang sudah tidak lagi menetap di Pasaman Barat sehingga sangat susah untuk melakukan fungsi koordinasi.

Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Keberhasilan capaian sasaran cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59	0.59	100.00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Faktor Pendukung capaian indikator kinerja cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah Paket Pekerjaan TA.2022 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Jalan Permukiman Dusun I Koja Kecamatan Kinali
- Peningkatan Jalan Ampar Putih Jorong Ksiak Putih Nagari Sungai Aur
- Peningkatan Jalan Blok A Jorong Sakato Jaya kecamatan Sungai Aur
- Peningkatan Jalan Dusun III Jorong Padang Lawas Kecamatan Luhak Nan Duo
- Peningkatan Jalan Dusun Selatan Katimaha Kecamatan Pasaman
- Peningkatan Jalan Komplek Kampung Dalam Jorong Air Haji
- Peningkatan Jalan Lingkar Lapangan Bola Karya Makmur Jorong Kasiak Putih Kecamatan Sungai Aur
- Peningkatan Jalan Mesjid Nurul Mutmainah Katimaha Kecamatan Pasaman
- Peningkatan Jalan Perumahan Istanaku Indah Kecamatan Pasaman
- Peningkatan Jalan Perumnas Kinali - PLN Kinali Kecamatan Kinali
- Peningkatan Jalan RT 03 - RT 04 Kampung III Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo
- Peningkatan Jalan Sungai Paku Jorong IV Koto Kecamatan Kinali
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bunut Jorong Alamanda Kecamatan Kinali
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun I Sidodadi Kecamatan Kinali
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT 05 Kampung 3 Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo
- Peningkatan Jalan Surau Baitullah Ibadah tanah Bakali Sungai Aur

Faktor Penghambat capaian indikator kinerja cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah pengembang masih banyak yang belum menyerahkan

asetnya ke Pemerintah Daerah, sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak bisa melakukan Paket Pekerjaan pendukung PSU di Lokasi Perumahan yang dibangun Pengembang Perumahan tersebut.

Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Keberhasilan capaian sasaran rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100.00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Faktor Pendukung tercapainya kinerja sangat baik pada indikator rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni adalah tersedianya anggaran dan regulasi yang tepat terhadap penanganan rumah rusak akibat bencana. Di tahun 2022 terjadi Gempa Bumi yang dinyatakan sebagai Bencana Kabupaten, bencana ini menyebabkan banyak kerusakan rumah bagi korban bencana baik itu dengan tingkat kerusakan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Penangan rumah korban bencana ini dilakukan secara bertahap dan untuk tahun 2022 dilakukan penanganan terhadap rumah dengan tingkat kerusakan rusak berat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana, Untuk rumah korban bencana dengan tingkat kerusakan rusak sedang dianggarkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi, sedangkan dana penanganan rumah korban bencana dengan tingkat kerusakan rusak ringan dianggarkan dari DAU Kabupaten Pasaman Barat.

Faktor Penghambat tercapainya kinerja pada indikator rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni adalah terdapat kekeliruan dalam pendataan rumah korban bencana sehingga dilakukan kembali pendataan ulang untuk memperbaiki data tingkat kerusakan rumah korban bencana.

3.1.2.6 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Keberhasilan capaian sasaran fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100.00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Pada tahun 2022 tidak ada rumah masyarakat yang terdampak relokasi pemerintah kabupaten sehingga capaiannya menurut peraturan SPM juga 100%.

Persentase penyelesaian izin lokasi

Keberhasilan capaian sasaran persentase penyelesaian izin lokasi ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100 %	100 %	100 %

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Faktor Pendukung indikator persentase penyelesaian izin lokasi adalah tingginya kesadaran masyarakat tentang pengurusan izin lokasi.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator persentase penyelesaian izin lokasi adalah terkait pencatatan izin lokasi yang sudah diterbitkan, bidang pertanahan masih perlu meningkatkan intensitas koordinasinya dengan DPMPTSP selaku pihak yang menerbitkan izin lokasi.

Persentase konflik pertanahan difasilitasi

Keberhasilan capaian sasaran persentase konflik pertanahan difasilitasi ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100 %	100 %	100 %

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Faktor Pendukung capaian kinerja indikator ini adalah masih banyaknya kasus konflik pertanahan di Kabupaten Pasaman Barat dan kesiapan Bidang Pertanahan dalam memediasi dan mendampingi penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Pasaman Barat.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator persentase konflik pertanahan difasilitasi adalah masih banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang belum mengetahui bahwa Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas dan Fungsi memfasilitasi Penyelesaian kasus konflik pertanahan.

Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah

Keberhasilan capaian sasaran jumlah fasilitasi ganti rugi tanah ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	9	9	100 %

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Faktor Pendukung indikator kinerja jumlah fasilitasi ganti rugi tanah adalah terjadinya ganti rugi terhadap hak masyarakat atas program pemerintah.

Faktor Penghambat capaian indikator kinerja ini adalah kurang dilibatkan dalam fasilitasi ganti rugi tanah.

Opini BPK atas laporan keuangan

Keberhasilan capaian sasaran opini BPK atas laporan keuangan ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100 %

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

Nilai SAKIP

Keberhasilan capaian sasaran nilai SAKIP ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP	A	CC	50 %

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Kurang”**.

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permuikiman dan Pertanahan tahun 2020 didukung oleh beberapa faktor yaitu :

1. Melakukan perbaikan padan dokumen kinerja dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan OPD
2. Perbaikan-perbaikan pada dokumen perencanaan OPD.
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Faktor Penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

1. Tidak samanya pemahaman aparatur dalam memahami sistem akutabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan dibuat.
2. Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcome.
3. Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Level maturitas SPIP

Keberhasilan capaian sasaran level maturitas SPIP ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Level maturitas SPIP	3	3	100 %

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki anggaran **Rp 43.143.447.184,00** dengan realisasi sebesar **Rp 15.365.813.431,00** atau **36%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.175.234.383	2.826.131.353	86%
2	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	44.345.092	37.621.298	85%
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	47.111.800	16.361.200	35%
4	Administrasi umum perangkat daerah	230.793.850	175.304.555	75%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.000.000	31.280.000	98%
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	78.910.000	44.254.825	56%
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	120.385.725	86.321.800	78%
8	Pendataan dan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	112.350.000	31.600.250	28%
9	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.448.000	-	-
10	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	26.810.217.400	1.686.250	0.01%
11	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	10.590.000	6.225.000	59%
12	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	401.200.000	341.694.250	82%
13	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	7.649.361.549	7.537.436.200	99%

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
14	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	2.133.500.000	2.114.404.200	99%
15	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.082.076.585	2.014.412.000	97%
16	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	15.172.000	-	-
17	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	25.386.000	11.523.000	45%
18	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	104.368.800	76.115.600	73%
19	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	20.076.000	13.441.650	67%
20	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0		
TOTAL		43.143.447.184	15.365.813.431	36%

Realisasi Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 hanya sampai 36% dari total pagu yang dianggarkan, hal ini disebabkan oleh anggaran untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditempatkan pada sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Perumahan tidak bisa dilaksanakan karena status bencana Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah darurat menuju pemulihan sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/188/BUP-PASBAR/2022 tentang Penetapan Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat sementara anggaran yang tersedia baru bisa digunakan setelah status bencana daerah adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan dalam 9 (sembilan) program
2. Hasil pencapaian atas indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/ penilaian terlaksana dengan “ sangat baik” .
3. Hal tersebut berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2022 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 100 % (dengan klasifikasi pengukuran penilaian : sangat baik)

4.2 Saran

Tingkat capaian kinerja menunjukkan outcome yang akan diciptakan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal perlu ditinjau ulang lokasi paket pekerjaannya, supaya target indikator dapat tercapai. Laporan kinerja merupakan alat evaluasi sehingga kendala yang muncul dapat dicari solusinya dan menjadi bahan perbaikan kinerja.

Simpang Empat, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas

